

**KTSP SEBAGAI KURIKULUM PENGANGKAT POTENSI DAN  
KESEJAHTERAAN DAERAH**

**Makalah**

**Disajikan**

**Seminar Nasional**

**Optimalisasi Potensi Daerah Dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan  
Pendidikan (KTSP) Berkualitas Nasional dan Global**

**Diselenggarakan Oleh:**

Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN);  
Bandung, Februari 2009



**Oleh:**

**Tatang Permana  
Mumu Komaro**

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin  
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Bandung  
2009

## ABSTRAK

### KTSP SEBAGAI KURIKULUM PENGANGKAT POTENSI DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Tatang Permana dan Mumu Komaro\*

Indonesia merupakan Negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah sehingga ironis jika rakyatnya miskin dan kekurangan. Kenyataan berkata lain, hingga Mei 2007 rakyat miskin Indonesia berjumlah sekitar 33 juta, dan Negara masih terbelenggu utang luar negeri, Rp 1.500 trilyun (Gatra, 2007), sedang hasil perhitungan Bank Dunia pada Desember 2006, 49% (108,78 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Indonesia juga menempati urutan nomor 41 negara berkembang terbukruk dari 177 negara berkembang dalam hal kriteria harapan hidup, ketercapaian pendidikan, dan pendapatan asli. Jika ditelusuri akar penyebabnya, pendidikan menjadi salah satu masalah utama. Jika kondisi pendidikan ini dibiarkan, sementara penduduk berkembang terus maka kemiskinan akan semakin meningkat dan makin membahayakan kehidupan rakyat Indonesia. Selama ini, pembangunan pendidikan kita kurang berbasis manusia, yang lebih menekankan aspek pengetahuan dan melupakan sikap, nilai, dan perilaku. Pendidikan di sekolah tersampaikan dalam penyajian yang hampa makna. Pendidikan yang selama ini dijalankan bersifat sentralistik. Kebijakan Pusat seragam untuk seluruh wilayah, padahal kebutuhan dan karakteristik daerah sangat beragam. Akibatnya pendidikan pun menghasilkan lulusan sentralistik yang tidak dapat secara langsung dimanfaatkan oleh daerah (Prima R, 2009). Karena hal di atas, diantara solusinya, lembaga pendidikan sebaiknya bersifat *contextualized* agar pendidikan dapat memberi manfaat langsung kepada peningkatan kualitas masyarakat dalam kehidupan di daerah setempat. Hal itu dimungkinkan dengan KTSP yang muatannya mengangkat potensi dan kesejahteraan daerah.

Kata kunci: KTSP, Kurikulum, Potensi, Kesejahteraan, Daerah

---

\*Drs. Tatang Permana, M.Pd., dan Drs. Mumu Komaro, MT, Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK - UPI

# KTSP SEBAGAI KURIKULUM PENGANGKAT POTENSI DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Tatang Permana dan Mumu Komaro\*

## A. Pendahuluan.

Indonesia merupakan negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah yang menjadi rebutan Negara-negara lain untuk ikut menikmatinya. Diantara kekayaan alam tersebut, meliputi: pertambangan, pertanian, peternakan, kekayaan bawah laut, pariwisata, hutan, dan sumber devisa lainnya.

Pertambangan minyak bumi (crude oil) atau minyak mentah, yang sebagian besar energi, baik energi panas, gerak ataupun listrik adalah hasil konversi pembakaran minyak bumi. Selain minyak bumi, tingkat konsumsi batu bara (coal), dan gas alam (natural gas) sebagai sumber energi juga cukup tinggi, walaupun masih di bawah minyak bumi. Pada dasarnya sumber daya alam dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable). Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak dunia yang tergabung dalam organisasi negara pengekspor minyak (OPEC). Pada medio delapan puluhan,. Dengan produksi minyak sebesar 1,7 juta barel per hari, walau sekarang setelah 20 tahun turun menjadi 1,4 juta barel per harinya. (Mohammad AH, 2009). Belum lagi pertambangan logam dan logam yang jumlahnya juga melimpah, dimana Indonesia menempati potensi tambang nomor enam terkaya di dunia (Arif SS, 2009).

Dalam bidang pertanian Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, keseluruhannya sekitar 21 juta hektar (Anton A, 2008). Disamping itu Indonesia masih memiliki sumber kekayaan alam yang banyak seperti, peternakan, kekayaan bawah laut, hutan, pariwisata, berbagai spesies binatang dan tanaman, dan sumber devisa lainnya.

Dengan sumber alam yang melimpah sangat ironis jika rakyat Indonesia tidak sejahtera, miskin dan kekurangan. Namun kenyataannya, rakyat Indonesia masih banyak yang hidupnya belum sejahtera, dan sepertinya tidak pernah berhenti dilanda krisis multidimensi seperti tingginya angka pengangguran, meningkatnya masyarakat miskin, rendahnya daya beli masyarakat, makin maraknya kerusakan, flu burung, gizi buruk, kasus korupsi yang belum juga berhenti yang menentukan peringkat korupsi di mata dunia, dan lain-lain.

Penduduk miskin Indonesia hingga Mei 2007 berjumlah sekitar 33 juta orang atau 16,5% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta orang. Masyarakat kelas menengah pun hanya mengisi kota-kota besar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di desa-desa masih tetap terpojok oleh struktur yang kurang memihak mereka. Negara juga masih terbelenggu utang luar negeri, yang jumlahnya mencapai Rp 1.500 trilyun (Gatra, 2007).

Peringkat Human Development Index (dengan kriteria harapan hidup, ketercapaian pendidikan, dan pendapatan asli) Indonesia ada pada posisi 108 (Vietnam 109) dari 177 negara. Peringkat Human Poverty Index (18,5) ada pada posisi 41 dari 102 negara berkembang, yang terburuk adalah Uruguay (3,3) berada pada peringkat pertama.

Hasil perhitungan Bank Dunia terbaru (Desember 2006) 49% (108,78 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin (Prima R, 2009).

Permasalahan di atas, jika diurut dan ditelusuri, maka diantara akar penyebabnya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan secara serius. Logika berfikir ini bisa dikemukakan sebagai berikut: angka pengangguran tinggi bisa dikurangi dengan membuka lapangan kerja, dimana lapangan kerja bertambah dengan bertambahnya perusahaan dan industri yang akan menghasilkan produk (barang dan jasa). Produk bisa dihasilkan melalui teknologi, dan teknologi bisa dibuat oleh manusia yang berpendidikan. Logika tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan bahwa pendidikan dapat menghasilkan teknologi yang dapat pembangunan industri yang berskala nasional dan internasional yang akhirnya mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf kehidupan.

Proses di atas sudah pasti memakan waktu yang lama dan menelan biaya yang besar. Jika berfikir dan berharaf instan, pengangguran bisa diatasi dengan cepat dengan cara mendatangkan investor yang membawa perusahaan, teknologi dan produk yang sudah jadi. Produk dan teknologi yang dibawa sudah pasti tidak sejalan dengan kompetensi masyarakat sekitar, dan akhirnya didatangkanlah SDM dari luar yang sudah terlatih. Tenaga kerja dari masyarakat sekitar, walau dibutuhkan hanyalah untuk tenaga pembantu yang tidak perlu memiliki keahlian khusus. Kondisi ini otomatis tidak akan banyak membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Investasi yang datang dari luar idealnya dibarengi dengan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan SDM di daerah sekitarnya, sehingga siap memanfaatkan investasi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Diyakini betul bahwa suatu bangsa dapat memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang melalui pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat mencerdaskan bangsa dalam arti luas yang dapat pula menumbuhkembangkan kesejahteraan bagi bangsa itu sendiri. Itu berarti bahwa pendidikan berkontribusi positif terhadap pembangunan kesejahteraan bangsa. Pendidikan diharapkan pula mampu membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter yang cukup untuk memenuhi kesejahterannya.

Pendidikan menjadi kunci sentral bagi kesejahteraan hidup. Pendidikan yang lemah menjadi penyebab lemahnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga jika kondisi pendidikan ini dibiarkan, sementara penduduk berkembang terus maka kemiskinan akan semakin meningkat dan makin membahayakan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu maka perlulah segera difikirkan solusinya agar rakyat Indonesia segera keluar dari krisis yang dihadapinya.

## **B. Pembahasan**

Pendidikan diselenggarakan melalui berbagai komponen penting, yakni: kurikulum selain guru, sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Indonesia telah beberapa kali merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Revisi kurikulum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta memberikan guideline atau acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pembangunan pendidikan kita selama ini sepertinya kurang berbasis manusia. Krisis moral yang terjadi juga akibat dari kesalahan dunia pendidikan yang lebih menekankan aspek pengetahuan dan melupakan sikap, nilai, dan perilaku. Pendidikan di sekolah tersampaikan dalam penyajian yang hampa makna. Misi setiap mata pelajaran terselewengkan menjadi penerusan materi (content transmission). Guru hanya menjadi pemberi informasi tentang mata pelajaran di kelas yang de-contextualized. Siswa menjadi "tong sampah" materi yang ditumpahkan guru. Akibatnya, perkembangan otak siswa tidak maksimal dan miskin ide baru. Lembaga pendidikan seharusnya bersifat contextualized agar pendidikan harus dapat memberi manfaat langsung kepada peningkatan kualitas masyarakat dalam kehidupan di daerah setempat (Prima R, 2009).

Selama ini pendidikan dijalankan dengan sumber terpusat atau bersifat sentralistik. Kebijakan Pusat disamakan untuk setiap daerah atau seragam untuk seluruh wilayah, padahal kebutuhan, kondisi dan karakteristik setiap daerah sangat beragam. Akibatnya pendidikan pun menghasilkan lulusan sentralistik yang tidak dapat secara langsung dimanfaatkan oleh daerah. Kompetensi lulusan sekolah-sekolah di daerah tidak dapat mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Walhasil, berbondong-bondong bekerja secara apa adanya. Daerah dengan potensi dan sumber kekayaan yang ada ditinggalkan penghuni produktifnya. Desa kehilangan generasi penerus pembangunan daerah. Pembangunan di daerah (desa, kecamatan, kabupaten) mandeg atau berjalan sangat lambat. Dalam hal ini pendidikan menjadi sia-sia atau mubazir karena tidak berwawasan pembangunan (daerah), dan tidak mengembangkan potensi yang ada.

Kurikulum yang ada yang bersifat sentralistik seperti dijelaskan di atas, jelas kurang mendukung untuk pembangunan daerah dengan berbasis potensi daerah. Guna menanggulangi masalah tersebut perlulah dirumuskan suatu sistem pendidikan yang mengatur pengembangan kurikulum yang bisa memberdayakan potensi daerah masing-masing. Hal ini sangat dimungkinkan dengan dikembangkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang didalamnya memuat pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya masing-masing.

Sesuai dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar yang terkait langsung dengan kurikulum adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, dan telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKI, tersebut di atas.

Berdasarkan SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) serta panduan yang disusun oleh BSNP, maka Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Mengingat bahwa SI, SKL dan KTSP ini harus sudah dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2009/2010, maka kegiatan sosialisasi dan pelatihan SI, SKL dan pengembangan KTSP

bagi para pendidik, tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus dilakukan kordinasi dan sinergi dengan semua pihak yang terkait, yang segera dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itulah maka disusun bahwa sosialisasi dan pelatihan SI, SKL dan Pengembangan KTSP yang telah disinkronkan bersama dengan Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Pendidikan Nasional. (*Sosialisasi dan Pelatihan KTSP. Jakarta:Depdiknas, Januari 2007*).

Undang-Undang No: 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan PP No: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan banyak ruang bagi lembaga pendidikan untuk membuat dan mengelola kurikulumnya sesuai dengan potensi dan kompetensi wilayah / lingkungan yang dimilikinya. Kesempatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh masing sekolah atau pihak pemerintah daerah setempat untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang lebih terarah, cakap dan terampil. Pendidikan yang mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusia untuk mengelola sumberdaya atau potensi daerah adalah pendidikan yang dikembangkan dengan kurikuum berbasis potensi daerah. Kurikulum yang bersifat nasional merupakan kerangka, sedangkan yang menjadi daging dan kulit adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah masing-masing.

Kenyataan yang ada atau fakta perihal belum sesuai kurikuum pendidikan yang mampu mengelola potensi daerah, banyak kita temui pada setiap daerah. Secara faktual, hal itu terlihat dari belum adanya manfaat nyata atau keuntungan nyata bagi daerah tempat sekolah itu berada, khususnya didaerah-daerah yang memiliki banyak potensi alam yang produktif. Di balik itu semua, kita ketahui bahwa Negara Indonesia memiliki berbagai ragam budaya dan kekayaan alam, yang bisa dikembangkan dan dikelola melalui kurikulum pendidikan sekolah ( kurikulum lokal ). Misalnya kurikulum sekolah di daerah pantai atau pesisir, sudah sepantasnya tidak disamakan dengan kurikulum sekolah di daerah pertanian.

Dalam melakukan pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah hendaknya memiliki beberapa landasan pengembangan kurikulum, kemudian landasan tersebut dipadukan secara rasional dan bersenyawa, Adapun landasan tersebut minimal terdiri atas : Landasan ideal, landasan yuridis, Visi-misi Lembaga, dan Pengembangan sistem evaluasi kurikulum. Landasan Yuridis sebagai rujukan standar minimal dalam pelaksanaan kurikulum. Landasan tersebut antara lain : UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP, Kepres, Kepmen dan KTSP. Visi-misi Lembaga merupakan pandangan, wawasan, dan cita-cita lembaga yang berfungsi sebagai arah dasar dalam merumuskan beberapa program secara berkelanjutan. Atas dasar ketiga hal di atas, mulailah merumuskan dan membuat beberapa Program kegiatan pengembangan Kurikulum berbasis potensi daerah yang mencakup: penyusunan panduan pengembangan kurikulum, penyusunan rancangan kurikulum pada setiap jenjang yang saling berkaitan, pengembangan silabus kurikulum, pengembangan bahan ajar kurikulum, pengembangan standar kelayakan lulusan, dan pengembangan sistem evaluasi kurikulum.

Implementasi kurikulum potensi daerah didasarkan kepada kurnas, potensi daerah serta Ilmu dan rasional terpadu dan bermakna. Kurnas adalah kurikulum nasional yang kemudian dijadikan sebagai kerangka dasar/standar minimal untuk pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah. Potensi daerah dalam hal keragaman potensi daerah/karakteristik daerah merupakan laboratorium untuk lebih memahami dan

menguasai pengetahuan tentang potensi daerah yang dimiliki, potensi daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pembelajaran. Sedangkan ilmu diperlukan untuk metodologi pengetahuan. Konsep ini ditujukan agar generasi penerus di daerah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengelola potensi daerah secara mandiri, kreatif dan produktif. Oleh karena sebaik-baiknya generasi penerus adalah mereka yang mampu berkarya unggul untuk membangun dan mengembangkan setiap potensi yang ada di daerahnya secara proposional dan berkelanjutan, sehingga dampak akhir kesejahteraan masyarakatnya meningkat dan kemiskinan berkurang.

Rasionalitas dalam pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah dimaksudkan bahwa potensi daerah dan keragaman budaya merupakan sub-sub sistem dari kehidupan sosial pada masing-masing daerah. Sedangkan konsep terpadu dalam kurikulum berbasis potensi daerah difokuskan pada karakteristik daerah. Bermakna ditandai dengan sifat: konstruktif, kolaboratif, konversasional, reflektif, kontekstual, kompleks, intensional, dan aktif.

### C. Kesimpulan

Lembaga pendidikan usulan bersifat contextualized agar pendidikan harus dapat memberi manfaat langsung kepada peningkatan kualitas masyarakat dalam kehidupan di daerah setempat, dan tidak lagi bersifat sentralistik yang belakangan di jalankan. Dalam melakukan pengembangan kurikulum berbasis potensi daerah hendaknya memiliki beberapa landasan pengembangan kurikulum yang dipadukan secara rasional dan bersenyawa. Adapun landasan tersebut minimal terdiri atas : Landasan ideal, landasan yuridis, Visi-misi Lembaga, dan Pengembangan sistem evaluasi kurikulum.

### D. Daftar pustaka min

- Anton Apriyantono, *Cukupkah Lahan Pertanian Kita?*, 2008, Pusaran Jawa Bali, [www.jawabali.com](http://www.jawabali.com)
- Arif S Siregar, *Potensi Tambang Indonesia Urutan Enam Terkaya*, 2009, Gatra, Makasar, [www.gatra.com](http://www.gatra.com)
- Depdiknas. (2007). *Materi sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Depdiknas.
- Gatra, *Makin Kaya di Negeri Miskin*, 2007, Gatra Nomor 50 Beredar Kamis, 26 Oktober 2007, [www.najib23.multiply.com](http://www.najib23.multiply.com)
- Mohammad Ashari Hadianto, *Kemiskinan dalam (Kekayaan) Sumber Daya Alam Indonesia*, 2009, Kantor Pusat PPSDMS, Jakarta, [www.ppsdms.org](http://www.ppsdms.org)
- Mulyasa, E.(2007) *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Prima Remolda, *Kurikulum Berbasis Potensi Daerah*, 2009, The Education Development Center Indonesia (EDC), Jakarta, [www.theedc.com](http://www.theedc.com)
- Zainal Mutaqin, D.(2006). *Seminar Pelaksanaan KTSP Di Sekolah*. Bandung: Depdiknas Kota Bandung

